

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara.

Pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial suatu bangsa dapat diwujudkan karena adanya sumber pendanaan yang tetap. Sampai sekarang ini sumber utama pembiayaan pembangunan adalah dari penerimaan pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan ekonomi nasional.

Peranan pajak dalam pembangunan diupayakan untuk semakin membangun kemandirian dalam pembangunan. Namun demikian, upaya tersebut masih menemui hambatan karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan.

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal.

Untuk mamaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Sistem perpajakan *Self Assessment System*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Sistem Self Assesment yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melalui SPT Tahunan yang dibagikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa fenomena-fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan aparat pajak dan wajib pajak membuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat digali secara optimal. Untuk kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin dalam Ester Tambunan, 2004).

Kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan dapat mendorong meningkatkan penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara semakin meningkat sebagaimana dilihat dari data Realisasi Penerimaan Negara yang bersumber dari Badan Pusat Statistik bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 penerimaan Negara khususnya penerimaan pajak mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat bahwa realisasi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara sebesar Rp 431,1 triliun. Begitu juga pada tahun berikutnya, pada tahun 2013 penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 465,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi Rp 538,8 triliun.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa terlihat adanya peningkatan penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak atau dengan menjangring Wajib Pajak baru. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak dapat dimulai dari penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meingkatkan kepatuhanWajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada Wajib Pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap Wajib Pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak dalam membayar pajak. Jika tidak memenuhi

kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakannya akan lebih banyak merugikannya.

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib Pajak.

Sampai sekarang ini, masih banyak orang pribadi atau badan yang belum membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Masih banyak yang menyembunyikan penghasilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
4. Apakah persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan mengetahui aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan bermanfaat bagi penulis.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pemahaman wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara garis besar terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III : Dalam bab ini meliputi lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini berisikan tentang profil responden dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dikemukakan.